

ASPEK STRATEGIS PEMBUMIHAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM MENGATASI DAMPAK PANDEMI COVID-19

Engkus Ruswana

Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia

eruswana@gmail.com

Abstrak

Bangsa Indonesia juga tidak terbebas dari pandemi covid-19 dan Pemerintah Indonesia berusaha mengerahkan segala kemampuannya untuk mengatasi bencana pandemi, baik dengan menggelontorkan anggaran negara yang cukup besar, mengerahkan berbagai institusi dan lembaga (pemerintahan, militer, dan berbagai sumberdaya kesehatan), serta jaringan hubungan antar negara dalam rangka pencegahan, penyediaan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan, namun hingga kini masih belum bisa dikatakan terbebas dari pandemi, meskipun jumlah kasusnya sudah jauh menurun sebagai hasil penanganan yang diakui dunia sebagai salah satu negara yang berhasil dalam pengelolaan penanganan pandemi covid-19. Hal ini, karena di beberapa negara masih ada yang kasusnya meningkat lagi (muncul gelombang baru), bahkan terus muncul varian-varian baru yang memerlukan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat Indonesia agar tidak terpapar dengan varian baru tersebut.

Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 sangat kompleks dan memberatkan yang dirasakan oleh semua negara, di mana selain banyak korban yang dirawat dan meninggal dunia, juga tidak sedikit memakan korban Sumber Daya Manusia (SDM) unggul termasuk tenaga kesehatan. Dampak selanjutnya adalah tersedotnya anggaran negara yang besar untuk upaya penanggulangan dampak pandemi, menurunnya pertumbuhan ekonomi hingga pertumbuhan negatif, meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat banyak perusahaan yang bangkrut, sehingga pengangguran dan jumlah rakyat miskin juga meningkat.

Kita sebagai bangsa membutuhkan upaya keras dalam kebersamaan dalam rangka upaya pemulihan akibat dampak pandemi, dan untuk itu perlu merevitalisasi dan mendayagunakan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk itu, maka diperlukan adanya upaya pembumihan nilai-nilai luhur Pancasila kepada segenap bangsa, dengan metoda yang sesuai dengan kondisi dan situasi perkembangan peradaban bangsa Indonesia.

Kata kunci: pancasila, potensi, bangsa, pandemi, toleransi, leluhur

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 melanda dunia sudah berlangsung selama hampir dua tahun, di mana penyakit yang dikenal sebagai Covid-19 disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Covid-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

Di Indonesia sendiri, pertama kali mengonfirmasi ditemukannya kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020, yang ketika itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa ditemukannya dua orang Indonesia yang terdeteksi positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun, yang tinggal di kota Depok. Sejak itu kemudian masalah covid-19 menjadi marak dan masif melanda seluruh wilayah di Indonesia, dan sangat menggemparkan.

Penambahan kasus baru covid-19 baik di dunia maupun di Indonesia hingga kini belum berhenti, walaupun jumlahnya sudah mengecil, di mana per hari Rabu 01 Desember 2021 kasus baru di dunia bertambah 704.258 orang dengan jumlah kasus meninggal 9.097 orang dan untuk kasus covid-19 di Indonesia pada hari Selasa 30 November 2021 tercatat 297 kasus baru dengan jumlah kasus kematian 11 orang. Apalagi kabar terakhir di beberapa negara terjangkit jenis varian baru *Omicron* yang ditemukan pertama kali di Afrika Selatan sehingga WHO memperingatkan bahwa varian virus corona *Omicron* berisiko menimbulkan lonjakan penularan di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan kita semua tidak boleh lengah dan harus tetap waspada dengan mematuhi protokol kesehatan, disamping terus meningkatkan jumlah vaksinasi penduduk.

Indonesia oleh WHO dikategorikan sebagai salah satu negara yang termasuk berhasil dalam mengelola pandemi Covid-19, namun sejauh ini masih belum bisa melonggarkan kewaspadaan, mengingat kondisi pandemi Covid-19 di dunia yang masih tidak menentu, dan beberapa negara yang tadinya sudah melonggarkan pengetatan protokol kesehatan ditimpa lagi gelombang baru, bahkan muncul varietas-varietas baru, termasuk di Indonesia yang pernah mengalami gelombang kedua yang mengesankan dengan munculnya varian Delta, sehingga kondisi terkini secara kasat mata kondisi kehidupan masyarakat Indonesia masih belum dapat pulih sepenuhnya seperti masa-masa sebelum pandemi, walau secara umum sudah membaik namun tetap tidak boleh lengah dan membutuhkan kewaspadaan yang terus menerus.

Dampak Pandemi Covid-19 dan Kemungkinan Pascapandemi

Pandemi covid-19 yang melanda dunia, sungguh-sungguh berdampak negatif secara signifikan terhadap negara-negara di dunia, yang menyebabkan jumlah kematian sangat besar dan kemerosotan ekonomi di berbagai negara.

Semua negara baik secara bersama maupun masing-masing berupaya mengatasi dan menanggulangi pandemi covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya.

- a. Banyaknya korban meninggal dan kehilangan SDM potensial

Bedasarkan laman Worldmeters (Kompas.com, 2021), dunia mencatat per 1 Desember 2021 pagi kasus terkonfirmasi covid-19 di dunia sudah mencapai jumlah sebanyak 263.002.247 (263 juta) orang dan yang meninggal sebanyak 5.232.451 (5,23 juta) orang, suatu jumlah yang tidak sedikit tentunya, sedangkan kasus aktif saat ini tercatat sebanyak 20.296.510 (20,3 juta) orang dengan rincian 20.212.149 (20,2 juta) pasien dalam kondisi

ringan dan 84.362 dalam kondisi serius. Kasus covid-19 di Indonesia tercatat masih ada penambahan, termasuk kasus sembuh dan meninggal dunia, dimana hingga Selasa 30 November pukul 12.00. kasus positif covid-19 bertambah 297 dari 200.899 orang yang diperiksa dalam 24 jam terakhir dengan tambahan kematian 11 orang, sehingga jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia sampai saat ini mencapai 4.256.409 (4,26 juta) orang. dengan total kematian sebanyak 143.830 jiwa. Namun menurut The Economist (CNN Indonesia), estimasi kematian akibat covid-19 di Indonesia sebanyak 280 ribu hingga 1,1 juta jiwa (± 5 x lipat dari angka resmi pemerintah). Perkiraan yang mungkin ada benarnya mengingat sebagian besar masyarakat baik yang terkontaminasi covid maupun yang meninggal, banyak yang menyembunyikan kasusnya dan tidak ingin diperiksa di rumah sakit, karena takut bilamana terindikasi covid-19 akan diperlakukan tata cara pelayanan atau perawatan pasien menurut standar covid-19, bahkan sering terjadi pasien maupun mayat yang diambil paksa keluarga dari rumah sakit, karena tidak menginginkan diperiksa covid.

Dari sebesar 144 ribuan orang yang meninggal akibat covid-19, Indonesia telah banyak kehilangan SDM yang potensial termasuk dari bidang kesehatan, yaitu kehilangan hampir 2000 orang tenaga kesehatan, angka kematian tenaga kesehatan terbesar di Asia dan angka terbesar ketiga di dunia, yang per 17 Agustus 2021 tercatat 1.891 tenaga kesehatan yang terdiri dari 640 dokter, 637 perawat, 377 bidan, 98 dokter gigi, 34 ahli gizi, 33 ahli teknologi laboratorium, dan 13 ahli kesehatan masyarakat (BBC NEWS Indonesia, 2021). Sungguh kehilangan besar bagi Indonesia, karena sangat sulitnya mencetak tenaga kesehatan di Indonesia.

b. Pembatasan pergerakan dan akses pekerjaan maupun pemanfaatan fasilitas

Semua negara yang terpapar covid-19 melakukan berbagai cara untuk menghambat penyebarannya dan berusaha mengurangi keparahan dampaknya, dengan cara menerapkan "*lockdown*" dan berbagai bentuk pembatasan pergerakan lainnya, termasuk Indonesia yang untuk pertama kali pada 17 April 2020 dengan menerapkan pola pembatasan pergerakan dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Kebijakan PSBB ini adalah merupakan strategi penanganan yang diterapkan pada suatu wilayah bilamana ditemukan jumlah kasus dan jumlah kematian Covid-19 meningkat dan menyebar secara signifikan dengan cepat dan ada keterkaitan dengan wilayah lainnya, dan mekanismenya dilakukan dengan cara gubernur/bupati/walikota mengusulkan PSBB, yang kemudian menteri kesehatan menetapkan persetujuan, dan PSBB kemudian diterapkan di lingkup wilayah tertentu (provinsi, kabupaten, atau kota) sesuai dengan usulan. Cakupan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, hanya sektor esensial yang diperbolehkan beroperasi penuh.

Setelah kasus Covid-19 dinilai cukup terkendali, pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali, sejak 11 Januari 2021 selama dua pekan dan sempat diperpanjang. Dalam pelaksanaan PPKM Jawa-Bali, kerja di kantor bisa diterapkan sebesar 75 persen dengan protokol ketat, kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring, tempat ibadah boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen, lalu sektor esensial bisa beroperasi 100 persen dengan pembatasan jam operasional dan juga kapasitas pengunjung, sedangkan restoran hanya diperkenankan menerima 25 persen pengunjung makan/minum di tempat, pusat perbelanjaan dibatasi buka hingga pukul 19.00 ([Tempo.co.id](https://tempo.co.id), 2021).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, kemudian diganti lagi menjadi PPKM Mikro sejak Februari 2021 yang berulang-ulang diperpanjang setiap 2

minggu. Pada PPKM mikro, pekerja yang bekerja di kantor dibatasi 50 persen. Pusat perbelanjaan atau mal boleh beroperasi hingga pukul 21.00. Kemudian, kapasitas makan di restoran/rumah makan dibatasi maksimal 50 persen. Kapasitas rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen.

Pascalibur Lebaran 2021 terjadi kasus lonjakan korban Covid-19, sehingga presiden memutuskan kebijakan untuk lebih memperketat PPKM Mikro pada pertengahan bulan Juni yang diberlakukan sejak 22 Juni 2021 selama 14 hari. Kebijakan itu antara lain berisi jumlah pengunjung di tempat makan maksimal 25 persen kapasitas, jumlah pekerja maksimal 25 persen di kantor yang berada di zona merah, dan larangan operasional tempat ibadah di zona merah (Tempo.co.id, 2021). Begitu pula sekolah di zona merah dilarang menggelar pembelajaran tatap muka. Namun kasus Covid-19 terus naik sehingga kemudian akhirnya Presiden Jokowi memutuskan kebijakan dengan menetapkan PPKM Darurat, karena pengetatan PPKM Mikro dianggap tidak cukup efektif untuk menanggulangi kasus Covid-19 yang kenyataannya jumlah korban terus meningkat hingga menembus kisaran 20 ribu kasus per hari.

Kebijakan PPKM Darurat ini menerapkan pengetatan aktivitas mencakup 100 persen bekerja dari rumah (*WFH/Work from Home*) untuk sektor non-esensial, kemudian seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring. Untuk sektor esensial, diberlakukan 50 persen maksimum staf *Work from Office* (WFO) dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen WFO. Kemudian, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup; restoran dan rumah makan hanya menerima *delivery/take away*; tempat ibadah dan area publik ditutup sementara.

Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I), dan khusus untuk perjalanan dengan moda pesawat, selain kartu vaksin, penumpang juga harus mengantongi hasil tes swab PCR dengan batas waktu H-2. Sedangkan penumpang untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, seperti laut dan darat, bisa menunjukkan dokumen tes Antigen dengan batas waktu H-1.

Kondisi ini memukul semua pelaku ekonomi dan penyedia layanan transportasi, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja dan kebangkrutan usaha.

c. Pertumbuhan ekonomi negatif

Penerapan PSBB dan kemudian PPKM mikro hingga PPKM Darurat menyebabkan terhambatnya pergerakan yang berdampak lebih lanjut kegiatan ekonomi tidak bergerak leluasa hingga terhenti, sehingga tercatat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebagai dampak covid-19, Indonesia sebagaimana juga negara-negara lainnya di dunia mengalami kontraksi pertumbuhan yang negatif dari angka pertumbuhan sebesar 5,02 % pada tahun 2019 jauh menurun menjadi minus (-) 2,07 % pada tahun 2020 (bps.go.id, 2021), dan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan dalam penanganan covid dan dampak yang ditimbulkannya, maka kondisi di tahun 2021 mulai membaik dimana pada Triwulan I mencapai tingkat pertumbuhan sebesar - 0,74 % dan kemudian meningkat lagi menjadi + 7,03 % pada triwulan II (feb.ui.ac.id, 2021), sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan selanjutnya terus meningkat secara positif.

d. Peningkatan korban PHK dan pengangguran

Sejak adanya pandemi Covid-19, banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi ini baik dari segi ekonomi, politik, sosial maupun budaya semuanya merasakan dampaknya.

Jumlah dan komposisi dari angkatan kerja Indonesia diprediksi mengalami perubahan akibat wabah virus corona (Covid-19). Jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur diperkirakan naik tajam pada tahun 2020. Prediksi ini mengacu pada komposisi angkatan kerja berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi jenis usaha, dan durasi jam kerja. Dari komposisi tersebut, krisis yang berciri simultan ini sangat berpotensi besar menambah jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3,5 juta hingga 8,5 juta orang sepanjang tahun 2020. Ini artinya tingkat pengangguran berpotensi naik dari kisaran 5,2 persen sampai 5,3 persen saat ini antara 7,7 persen dalam skala moderat dan 10,3 persen dalam skala berat. (Al-Mizan, 2019)

Meningkatnya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh berapa hal antara lain:

- (1) Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut melakukan PHK karyawan-karyawannya, dimana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK.
- (2) Adanya *lock down* dan PSBB membuat pengguna barang dan jasa atau pelanggan sepi sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur.
- (3) Adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk tetap di rumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatas dalam bekerja ataupun melakukan usaha sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut.

Secara garis besar mungkin tiga hal tersebut adalah penyebab utama angka pengangguran di masa pandemi ini bisa meningkat pesat.

Dari data BPS, tercatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,31 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,26 persen, atau turun 0,81 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.

Penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang, yaitu meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,34 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan (0,30 persen poin). Sebanyak 78,14 juta orang atau 59,62 persen bekerja pada kegiatan informal, turun 0,85 persen poin dibanding Agustus 2020 dan persentase setengah penganggur turun sebesar 1,48 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,13 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 0,65 juta orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 15,72 juta orang. (BPS, 2021)

e. Anggaran negara tersedot untuk penanggulangan pandemi Covid-19

Untuk menanggulangi pandemi covid-19 dan upaya untuk memulihkan ekonomi nasional, negara telah menyediakan anggaran sebesar Rp 695,2 Triliun dari total anggaran tahun 2020 yang besarnya 2.613,8 Triliun, yang berarti 26,6 % anggaran nasional dialokasikan untuk penanggulangan pandemi covid-19 beserta dampaknya.

Realisasi anggaran tahun 2020 untuk Program PC-PEN (Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) yang diprioritaskan untuk merespon kondisi kesehatan yang mengalami dampak luar biasa akibat pandemi, juga untuk memulihkan daya beli

masyarakat, membantu dunia usaha, termasuk UMKM pada tahun 2020 mencapai angka Rp 575,8 Triliun (82,83%) dari alokasi sebesar 695,2 Triliun, yang dialokasikan pada 6 klaster dengan realisasi (kekeku.go.id, 2021):

1. Perlindungan sosial (perlinsos)	:	Rp 216,6 Triliun
2. Dukungan UMKM	:	Rp 112,3 Triliun
3. Sektor K/L dan Pemda	:	Rp 65,2 Triliun
4. Sektor Kesehatan	:	Rp 62,6 Triliun
5. Pembiayaan Koperasi	:	Rp 60,7 Triliun
6. Sektor Insentif Usaha	:	Rp 58,4 Triliun

Dana untuk sektor kesehatan, diantaranya diperuntukkan untuk obat-obatan, vaksin, alat kesehatan, operasional pelayanan kesehatan dan tunjangan tenaga kesehatan.

Untuk tahun anggaran 2021, pengalokasian dana untuk PC-PEN juga mengalami kenaikan, dari rencana semula sebesar Rp 699,43 Triliun menjadi Rp 744,75 Triliun (jatimprov.go.id, 2021), di mana sebesar Rp 255,11 Triliun dialokasikan untuk belanja penanganan covid-19, yang berarti meningkat sebesar 7,13% dari alokasi anggaran tahun 2020 atau meningkat sebesar 29,34% dari realisasi program PC-PEN tahun 2020.

Dengan demikian, maka jumlah anggaran yang disediakan negara untuk menangani covid-19 beserta dampaknya sangatlah besar, dan tentu memengaruhi kemampuan pembangunan sektor lainnya.

f. Masalah Sosial

Pandemi covid-19 selain menyebabkan berbagai masalah kesehatan, juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negara yang berdampak lebih lanjut terhadap masalah sosial, antara lain kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, apatisme masyarakat dan meningkatnya sensitifitas masyarakat terhadap isu-isu sosial-politik.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah warga yang masuk katagori miskin di Indonesia meningkat lebih dari 2,7 juta akibat pandemi Covid-19, dan menurut peneliti meningkatnya angka kemiskinan diakibatkan oleh kebijakan pemerintah terhadap masalah pandemi pada awalnya kurang tegas dan upaya untuk memulihkan kondisi ini memerlukan waktu yang cukup lama. BPS mencatat kenaikan angka kemiskinan pertama dalam tiga tahun terakhir akibat virus corona, namun pemerintah telah berusaha menekan kenaikan angka kemiskinan melalui berbagai program, diantaranya melalui pemberian bantuan sosial, dan bantuan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) demi pemulihan ekonomi, sehingga berdampak tingkat kemiskinan Indonesia sedikit turun dari 10,19% pada September 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021, namun angka tersebut tetap masih lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi covid-19 yang besarnya mencapai 9,22% pada bulan September 2019. (smeru.or.id, 2021)

Hampir semua negara di dunia dilanda pandemi covid-19, dan berdampak terhadap krisis ekonomi, tidak terkecuali Indonesia yang tercatat perekonomiannya memasuki krisis sejak mulai pada triwulan kedua tahun 2020, sebagai dampak dari semakin banyaknya populasi yang terinfeksi COVID-19 yang sebagian diantaranya adalah termasuk katagori tenaga/SDM yang produktif yang berdampak lebih lanjut menurunnya kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diterapkannya pembatasan sosial oleh pemerintah menyebabkan kegiatan perekonomian mengalami hambatan hingga banyak kegiatan usaha yang harus ditutup, yang berdampak lebih lanjut banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan atau jadi pengangguran.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menghambat bertambahnya jumlah pengangguran, maka pemerintah telah menempuh berbagai strategi, diantaranya dengan menerapkan kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan,

penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial (kompaspedia, 2021).

Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua upaya, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sehingga memenuhi kebutuhan dasarnya. Strategi tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam arah kebijakan yang mencakup 7 (tujuh) hal:

- (1) Pengembangan integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai, antara lain program sembako yang mengintegrasikan bantuan pangan nontunai (BPNT), subsidi listrik, dan subsidi LPG, integrasi data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), serta penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai yang mempermudah masyarakat miskin.
- (2) Penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- (3) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan komprehensif dan terintegrasi
- (4) Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif
- (5) Peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
- (6) Penguatan skema pendampingan, layanan terpadu, dan perbaikan penargetan program penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang secara bertahap diperluas hingga 60 % di tahun 2021 dan menuju Registrasi Sosial 100 % tahun 2024
- (7) Pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, kemitraan, dampak sosial, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan rakyat.

Potensi Bangsa Dalam Mengatasi Berbagai Permasalahan

Setiap bangsa memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, yang terpancarkan dalam karakter, budaya serta nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat dan dijadikan pegangan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang tentu tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan kondisi alam lingkungannya.

a. Kondisi Alam Nusantara

Kita sebagai bangsa Indonesia patut selalu bersyukur karena telah dikaruniai tanah air Nusantara dengan alam lingkungan yang sangat indah-permai dan memiliki banyak keunggulan, sehingga atas keindahannya tersebut, seorang tokoh asal Belanda yang bernama M.A.W. Brouwer yang dikenal sebagai budayawan, fenomenolog dan psikolog menyatakan Bumi Pasundan (Nusantara) diciptakan pada saat Tuhan tersenyum, dan karena keindahan dan kesuburannya Indonesia juga dijuluki sebagai *Heaven of Earth* atau surganya dunia, juga sering dijuluki sebagai Zamrud Khatulistiwa., Negeri Seribu Candi, Negeri Megabioversitas, Negeri Nyiur.

Julukan Zamrud Khatulistiwa disematkan, karena Indonesia memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah dan terletak di bawah garis ekuator atau khatulistiwa.

Namun julukan Zamrud Khatulistiwa tersebut diberikan bukan karena semata-mata letaknya yang berada di bawah garis khatulistiwa, akan tetapi lebih karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Di mana gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata bagaikan batu Zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa.

Secara geografis tanah air Indonesia berada di kawasan yang beriklim tropis dan dilalui oleh garis Khatulistiwa, sehingga setiap tahun hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, sehingga penduduk Nusantara dapat melakukan kegiatannya sepanjang tahun tanpa dibatasi kondisi iklim yang ekstrim, karena tidak mengalami musim dingin yang membeku (bersalju) dan tidak mengalami musim panas yang menyengat.

Letak geografisnya yang terletak diantara 2 benua dan 2 samudera serta berada di jalur simpangan perhubungan dua wilayah budaya besar dunia Barat dan dunia Timur, dan sejak jaman Purba berada di tengah-tengah jalur lintasan dua kawasan budaya besar Hindia dan China, sehingga menempatkan kawasan Nusantara sebagai kawasan yang sangat penting dan strategis yang terbukti menjadi simpul pertemuan berbagai budaya besar sejak jaman kuno.

Dari segi bentuk wilayahnya, Nusantara merupakan wilayah kepulauan yang tersebar dengan indah terdiri lebih dari 17.000 buah pulau dengan keberagaman ukuran dari pulau besar hingga pulau-pulau kecil, dari pulau yang padat penduduknya hingga pulau tidak berpenghuni, dengan bentuk fisiografis yang juga beragam dari bentuk pesisir pantai, dataran, lembah, perbukitan dan pegunungan, dengan suhu yang relatif panas hingga yang bersuhu cukup dingin di pegunungan sungguh merupakan keberagaman yang sangat menakjubkan.

Tidak hanya itu, kondisi tanah Nusantara juga memiliki tingkat kesuburan yang baik, karena banyak mengandung humus dan pengaruh gunung berapi yang tersebar, juga ditunjang banyaknya sumber air, menyebabkan Tanah Air Indonesia umumnya subur, dan hampir tidak ada jenis tanaman yang tidak bisa tumbuh di Indonesia, sehingga keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna di Indonesia merupakan yang terkaya di dunia, sehingga dijuluki Negeri Megabioversitas. Kondisi kesuburan dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia lebih dari cukup untuk menunjang keberlangsungan (*survival*) kehidupan penduduk Nusantara, sejak jaman purba.

Selain kekayaan yang dimiliki di permukaan bumi, di dalam bumi pun bangsa kita dianugrahi kekayaan sumber alam dan mineral yang tidak sedikit. Hampir semua jenis logam dan mineral yang dibutuhkan dunia banyak terdapat di bumi pertiwi kita, sehingga wajar sejak jaman kuno/purba bangsa Nusantara telah mencapai masa keemasan dan kejayaan di dunia, dan atas kekayaan tersebut sejak jaman dulu Nusantara menjadi tempat tujuan bagi bangsa-bangsa di dunia, bahkan banyak bangsa-bangsa lain di dunia berebut ingin menguasai bumi Nusantara, dan terbukti bangsa kita pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama akibat bangsa kita mudah dipecah-belah dan sudah meninggalkan nilai-nilai luhur kearifan bangsa Nusantara. Hingga kini, nyatanya kekayaan yang dikandung di negeri pertiwi masih banyak yang dikuasai (ditentukan) asing dalam pemanfaatannya.

b. Karakter dasar manusia Indonesia

Karakter dasar suatu bangsa tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi alam lingkungannya, dalam arti karakter suatu bangsa dibentuk dan ditempa oleh alam-lingkungan tempat mereka tinggal.

Alam yang keras dan gersang akan melahirkan karakter manusia yang keras, ulet, berdaya saing (siap berperang) dan memiliki daya tahan tinggi terhadap berbagai tantangan hidup,

lebih mementingkan individual/kelompok, namun terkadang menghalalkan segala cara demi untuk *survive*, sedangkan manusia (bangsa) yang berdomisili di alam yang indah, subur-makmur memiliki karakter dasar yang ramah, damai dan bersahabat, lebih mementingkan pola hidup kebersamaan, suka menolong dan mudah empati, suka bersyukur dan religius, tidak suka konflik dan menghindari persaingan, serta berusaha mengalah selama memungkinkan. Namun apabila sudah terdesak dan melebihi batas kesabaran akan timbul jiwa pejuang yang rela korban jiwa-raga dan pantang menyerah.

Manusia (bangsa) yang hidup pada alam yang keras dan gersang memiliki karakter ingin menundukkan alam, sehingga tidak memiliki hubungan spiritual antara dirinya dengan alam, sebaliknya manusia (bangsa) yang hidup pada alam yang indah-permai, dan subur makmur memiliki karakter bersyukur dan berterima kasih kepada alam, ingin menyatu dengan alam, sehingga terbangun hubungan religius-spiritual dengan alam.

c. Nilai-nilai dalam masyarakat dan negara

Budaya merupakan ekspresi jiwa dan manifestasi pemikiran/pemahaman manusia terhadap makna hidup dan kehidupan, yang mengandung muatan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat/komunitas tertentu. Ekspresi budaya sudah barang tentu perwujudannya akan menyelaraskan dengan kondisi alam-lingkungannya dan adat-istiadat yang dianut dan hidup di komunitasnya.

Indonesia yang memiliki keanekaragaman bentuk alam, iklim, dan memiliki berbagai keragaman flora dan fauna, serta keberagaman suku, budaya, dan kekhasan keahlian masing-masing etnis, adalah merupakan kehendak Yang Maha Kuasa yang mencerminkan (miniatur) keberagaman di dunia. Karena keberagaman itulah, alam mengajarkan manusia Indonesia sangat akrab dan terbiasa dengan kehidupan bersama dalam perbedaan, sehingga bukan hanya sebatas toleransi namun sampai dengan empati dan harmoni telah menjadi "genetika" atau karakter dasar bangsa Indonesia, karena disadari dan dihayati betul perbedaan yang ada merupakan keniscayaan dan kehendak Tuhan, serta pemahaman bahwa perbedaan merupakan jalan untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing demi mencapai tujuan bersama.

Manusia Indonesia belajar dari alam lingkungan tempat bernaung mereka, serta mengkaji makna hidup dan kehidupan yang selanjutnya dimanifestasikan dalam sistem nilai yang dianut dan dijadikan pedoman hidup. Sistem nilai tersebut selanjutnya diekspresikan dalam bentuk budaya maupun tradisi, termasuk dalam bentuk ritus-ritus dan upacara-upacara adat.

Lokasi strategis Nusantara yang sejak jaman purba telah menjadi tempat persinggahan pelayaran antar bangsa yang berbudaya tinggi, maka adalah keniscayaan terjadinya silang budaya sebagai dampak lintas budaya antar bangsa, namun mengingat bangsa Nusantara juga sudah memiliki budaya yang tinggi, maka bangsa Nusantara mampu menyerap sistem nilai dan budaya dari luar yang berguna secara bijak dan harmonis untuk memperkaya budaya yang ada tanpa menghapus budayanya sendiri, serta terbukti mampu menangkal nilai-nilai dan budaya yang negatif.

d. Nilai-nilai Luhur yang terkandung dalam Pancasila

Nilai-nilai luhur Pancasila lahir dan tumbuh di Nusantara, tidak terlepas dari berkah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugrahi berbagai keberagaman kekayaan. Pancasila lahir karena keberagaman, Pancasila lahir karena keindahan dan kesuburan alam Nusantara yang indah dan subur makmur, sehingga melahirkan karakter bangsa yang religius, toleran ramah dan nyaman dengan kebersamaan, suka bergotongroyong, mengedepankan kasih dan damai, yang kesemuanya merupakan landasan dan jiwa Pancasila.

Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan simpulan nilai-nilai budaya yang dianut dan karakter dasar bangsa Nusantara. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, dimana kehidupan spiritual masyarakat bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari, dan berbagai agama sejak dahulu dapat tumbuh subur dalam setiap etnis di Nusantara dan saling menghargai antar sesamanya, namun pada beberapa dekade terakhir keharmonisan hidup beragama sedikit mengalami gangguan, khususnya pada kelompok tertentu yang telah mengabaikan nilai-nilai Pancasila.
- Sebagian besar masyarakat bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai humanisme yang dianut dan dijadikan pedoman hidup bermasyarakat, mengedepankan kasih-sayang sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai suci religiusitas, misalnya tuntunan hidup yang dianut masyarakat Sunda untuk menerapkan prinsip silih asih – silih asuh – silih asah.
- Bangsa Indonesia memiliki karakter dasar toleran dan menghargai perbedaan, karena sadar akan kasunyataan atas keberagaman. Sikap ini terbukti dalam sejarah, bangsa-bangsa yang datang ke Nusantara termasuk budaya dan sistem keyakinan yang dibawanya diterima dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti selama bangsa-bangsa tersebut datang dengan damai. Begitu pun dalam hubungan antar suku/etnis, secara umum tidak ada hambatan yang berarti apabila suku yang satu datang dan bermukim pada wilayah suku/etnis yang lainnya, bahkan tidak ada halangan bagi perkawinan campuran antar suku/etnis, bahkan di masa lalu perkawinan beda agama bukan masalah.
- Pola hidup gotong-royong, saling membantu tolong menolong dalam berbagai kegiatan baik dalam menghadapi kesusahan dan kesulitan (*sapapait-samamanis*), maupun dalam kesenangan hingga kini masih banyak diterapkan dan hidup di berbagai wilayah di Indonesia.
- Bangsa Indonesia memiliki pemahaman bahwa dunia yang besar ini diperuntukkan bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan (manusia, hewan dan tumbuhan), untuk itu maka dalam kehidupan harus berbagi, manusia memiliki harkat yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kebiasaan memutuskan sesuatu yang didasari kepentingan bersama dan hasil pemikiran bersama, prinsip musyawarah menjadi dasar dalam mengambil keputusan, terbukti dalam pranatan sosial sejak jaman kuno sudah menerapkan sistem musyawarah mufakat, seperti dapat dilihat peninggalannya pada situs-situs purbakala yang menyediakan ruang/ornamen tempat bermusyawarah. Dengan menerapkan musyawarah, maka:
 - mengindari kepentingan untuk mengejar ambisi pribadi/kelompok
 - dapat membangun rasa memiliki dan tanggungjawab bersama, sebagaimana peribahasa “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”, atau di Pasundan dikenal dengan peribahasa *sabanda-sariksa-sapariboga* (harta bersama-rawat bersama-sesuai tanggungjawab masing-masing).
- Keadilan sosial sebagai manifestasi dari sifat religius dan humanis yang hidup di masyarakat dilandasi pemahaman mengenai hakekat hidup dan kehidupan, serta bercermin pada kenyataan indahnya harmoni dalam diri yang kemudian disadari kebutuhan untuk harmoni dengan sesama, dan harmoni dengan alam. Tuntunan hidup harmoni ini dalam peribahasa/semboyan di tanah Sunda dikenal dengan istilah *sareundeuk-saigel-sabobot-sapihanean* (melakukan kegiatan dalam kebersamaan yang akrab, setara dalam keteraturan).

Leluhur bangsa Indonesia telah menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak dahulu kala, karena kesadaran atas keberagaman yang memang realitas kasunyatan atas kehendak Yang Maha Kuasa. Penerapan prinsip dan semboyan hidup *bhinnekatunggal ika tan hana dharma*

mangrwa memang dijadikan pedoman berbangsa dan bernegara pada jaman pemerintahan Majapahit, tapi sesungguhnya dalam kenyataan penerapan toleransi dan sikap menghargai perbedaan sudah jauh lebih lama dijadikan pedoman berkehidupan pada peradaban sebelumnya, seperti di jaman kerajaan Tarumanagara (abad 4-7), jaman kerajaan Galuh dan Kalingga, jaman Mataram Kuno (kerajaan Bhumi Mataram dan Bhumi Sambhara), serta jaman kerajaan Sriwijaya sampai dengan jaman Majapahit. Perkawinan beda agama selain untuk menyatukan kekuatan juga untuk menghindari peperangan, karena beda agama bukan masalah besar, namun harus dikelola dengan bijak.

Di masa Orde Baru untuk menanamkan jiwa dan perilaku hidup yang sejalan dengan ideologi bangsa Pancasila, telah diterbitkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan rumusan 45 butir-butir Pancasila yang merupakan formulasi dari nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. (*TAP MPR No. I/MPR/2003-Pasal-6 telah mencabut 104 TAP MPRS/MPR. Pada nomor 52 juga disebutkan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), dengan demikian demikian 45 butir Pancasila tidak berlaku lagi*).

Pembumian Nilai-nilai Luhur Pancasila Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid 19

Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dirumuskan sebagai hasil rajutan nilai-nilai luhur kearifan lokal bangsa Indonesia yang melekat, dihayati dan menjadi jiwa di dalam genetika seluruh suku bangsa di Nusantara (Sila & Burhani, 2020; Christomy, 2008).

Sistem nilai Pancasila terbentuk dan menjadi “genetika” bangsa Indonesia tentu terbentuk karena tempaan alam selama berabad-abad dari generasi ke generasi, sehingga sesungguhnya akan tetap kuat melekat dalam jiwa bangsa Indonesia, apabila terus dipelihara dan dirawat. Hal ini terbukti, hingga kini upaya-upaya untuk melengserkan Pancasila dari bumi Nusantara dan mengganti dengan ideologi lain selalu mengalami kegagalan, seperti pemberontakan DI/TII dan PKI yang ingin mengganti Pancasila, begitupun perdebatan alot untuk merumuskan kembali dasar negara pada sidang Konstituante 1955-1959, pihak-pihak yang ingin menggeser Pancasila dari dasar negara mengalami kegagalan. Untuk itu, maka agar Negara Republik Indonesia tetap berdiri tegak dengan utuh, maka nilai-nilai Pancasila perlu terus ditanamkan dalam jiwa generasi muda maupun kepada masyarakat umum dari jaman ke jaman, dengan kata lain perlu adanya upaya untuk pembumian nilai-nilai luhur Pancasila kepada seluruh anak bangsa.

Pembumian nilai-nilai luhur Pancasila juga potensial untuk mengatasi dampak pandemi covid-19, mengingat dalam mengatasi serta memulihkan dampak pascapandemi covid-19 dibutuhkan kesabaran, gotongroyong dan kebersamaan, kerja keras, disiplin, semangat, optimisme, niat baik, dan sebagainya yang kesemuanya terkandung di dalam nilai-nilai luhur Pancasila.

a. Tantangan

Upaya-upaya untuk meruntuhkan Pancasila oleh kelompok atau penganut paham tertentu hingga kini belum berhenti, dan tantangan terkini muncul dari kelompok-kelompok yang ingin memaksakan penerapan syariat Islam dengan mendirikan sistem khilafah di Indonesia. Tantangan ini nyata dan berbahaya, karena terkait dengan masalah agama yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dan rawan untuk dipolitisasi. Tantangan lainnya adalah terkait dengan bonus demografi, dimana proporsi penduduk usia muda mendominasi dalam statistik penduduk Indonesia, maka diperlukan metodologi tertentu untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila pada generasi milenial dan generasi-Z.

Berkembangnya demokrasi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta kemajuan teknologi digitasi dan informasi yang banyak dikuasai generasi muda, dan kekurangpedulian kaum muda terhadap politik kebangsaan, juga membutuhkan cara efektif untuk menanamkan jiwa kebangsaan.

b. Metodologi

Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam teknologi informasi dan teknologi digital, maka ada beberapa alternatif metodologi dalam menanamkan jiwa dan semangat Pancasila (pembumian nilai-nilai Pancasila), diantaranya adalah menggunakan metodologi:

- Dialog, baik secara tatap muka (luring) maupun melalui jaringan internet (daring). Metode ini bisa dilakukan di lingkungan generasi dewasa muda, maupun dewasa tua.
- Ceramah, melalui paparan dan tanya-jawab, yang lebih cocok diterapkan pada kelompok anak-anak sekolah tingkat dasar dan menengah pertama.
- Komunikasi, diskusi, dan paparan melalui media sosial, seperti Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, dan sebagainya.
- Aktifitas luar ruang, yaitu melalui kegiatan di alam terbuka, melalui kegiatan *camping ground*, gelar budaya, permainan, diskusi, kuis, temu-wicara, olahraga bersama, *outbond*, kunjungan, *home-stay*, dan sebagainya yang cocok diterapkan untuk generasi muda.

c. Peran masyarakat dan organisasi masyarakat

Upaya untuk menanamkan jiwa dan semangat Pancasila (pembumian nilai-nilai Pancasila) membutuhkan peranserta dan kontribusi semua elemen bangsa. Mengingat nilai-nilai luhur Pancasila harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh bangsa, maka peran masyarakat beserta organisasi masyarakatnya sangat menentukan keberhasilan pembumian Pancasila. Masyarakat dan organisasi masyarakat dapat menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

d. Dukungan negara (pemerintah dan pemerintah daerah)

Negara merupakan entitas yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta akan menentukan maju-mundurnya suatu bangsa. Begitu pula halnya dengan upaya untuk mengatasi dan memulihkan dampak covid-19 melalui pembumian Pancasila, peran dan dukungan negara, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah, akan membutuhkan dukungan dan komitmen negara.

Semua bangsa dan negara di dunia hingga kini masih terus berusaha untuk menanggulangi dan mengatasi pandemi covid-19 beserta dampaknya, yang hingga kini masih belum sepenuhnya bisa diatasi.

Untuk mengatasi masalah pandemi dan memulihkan keadaan paska pandemi covid-19 di Indonesia akan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selain dalam konteks waktu dalam kaitan dengan mental dan spiritual pun dibutuhkan kesabaran dan spirit bangsa. Pada nilai-nilai seperti dialog dan toleransi itulah bangunan kemanusiaan, ruh kebangsaan semakin kuat mengakar (Bolo, 2020). Dengan demikian upaya pembumian nilai-nilai luhur Pancasila merupakan salah satu jalan yang perlu terus dilaksanakan di Indonesia dalam situasi apapun.

Daftar Pustaka

- Bolo, A.D. (editor). (2020). *Menjaga harmoni dan Toleransi di Tengah Pandemi Covid-19*. Bandung: Unpar-Press
- Christomy, T. (2008). *Sign of the Wali-Narratives and the Sacred Sites in Pamijahan, West Java*. Canberra: ANU E Press
- Sila, M.A. & Burhani, M. 2020. *Ensiklopedi - Agama, Kepercayaan, dan Paham Keagamaan*. Jakarta: Pesat
- Fahri; Jalil, A; kasnelly, S. (2019). Meningkatnya Angka Pengangguran di Tengah Pandemi (Covid-19). *Al-Mizan; Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2. Edisi 2, (Desember 2019), pp. 45-60.
- <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>, 2021
- <https://www.keekeu.go.id>, 2021
- <https://kompaspedia.kompas.id/>, 2021
- [https://www. Tempo.co.id](https://www.Tempo.co.id), 2021
- <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014>
- <https://www.jatimprov.go.id>, 2021
- BPS. Jakarta (2021).
- BBC NEWA Indonesia, 30 Agustus 2021

